

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan penting di seluruh aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan kepribadian manusia. Kalau bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian, arsitektur, dan sebagainya berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, pendidikan berkaitan langsung dengan pembentukan manusia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalahnya, baik diri dan lingkungannya. Dengan demikian pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan alat yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa ”setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Berdasarkan amanat tersebut berbagai upaya telah dilakukan termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang mulai dilaksanakan pada tahun 1994.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya wajib belajar bagi warga negara. Hal ini berhubungan erat dengan kewajiban negara memberikan layanan pendidikan dan pengajaran yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara.

Tiga pilar penting pembangunan pendidikan nasional yaitu perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik tertuang dalam Renstra Pembangunan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pembangunan pendidikan nasional paling kurang lima tahun ke depan diarahkan pada ketiga hal tersebut.

Program perluasan akses dan pemerataan pendidikan akan dapat berhasil mencapai target apabila dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Oleh karena itu pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu Negara. Untuk itu pemerintah berusaha meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat minimal pada jenjang sekolah menengah pertama.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu. Hal ini dipertegas oleh instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, yang mengintruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur, Bupati dan walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah tersebut.

Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*)

Peraturan pemerintah lainnya yang menjelaskan tentang Wajib Belajar adalah Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2008, yang menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh

warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, ayat (2) pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu merupakan program yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penuntasan wajib belajar tersebut harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun yang meliputi enam tahun Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah dilaksanakan sejak tahun 1994. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun diperuntukkan bagi lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada pada kelompok umur 13 – 15 tahun atau usia SMP. Langkah ini merupakan kelanjutan dari wajib belajar enam tahun di tingkat SD bagi kelompok umur 7 – 12 tahun yang dimulai pada tahun 1984.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan guna memperoleh pendidikan bagi semua kelompok umur 7 – 15 tahun. Melalui Wajib Belajar, rata-rata pendidikan minimal bangsa Indonesia yang semula enam tahun ditingkatkan menjadi sembilan tahun. Peningkatan Wajib Belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun memungkinkan peserta didik untuk lebih lama belajar di sekolah. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mereka untuk mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempuh studi lanjutan di tingkat yang lebih tinggi serta untuk hidup di tengah masyarakat. Dengan Wajib Belajar, maka semua lulusan SD didorong untuk melanjutkan ke SMP. Untuk itu berbagai kendala yang menghambat aktivitas siswa dari SD ke SMP sedapat mungkin dihilangkan.

Pada tahun 1994 penuntasan wajib belajar sembilan tahun dimulai dengan target tuntas pada tahun 2003/2004, namun karena terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 program ini tidak dapat berjalan dengan baik sehingga target tidak tercapai. Kemudian program ini dijadwal ulang dan ditargetkan tuntas pada tahun

2008/2009d\ dengan mengimplementasikan berbagai alternatif program penuntasan yang efektif dan efisien. Dalam kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi peningkatan APK SMP/MTS yaitu pada tahun 1995 62,67 % naik menjadi 88,64 % pada tahun 2006. Menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 masih ada sekitar 1 juta usia anak 13 – 15 tahun, untuk tingkat SMP, masih belum memperoleh layanan pendidikan dasar sembilan tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain (1) kondisi dan/atau letak geografis tempat tinggal penduduk yang sulit dijangkau karena terpencil dan terbatasnya sarana transportasi; (2) kondisi ekonomi yang lemah; (3) hambatan budaya/tradisi; (4) kurangnya fasilitas dan daya tampung SMP/MTs; dan (5) hambatan kondisional seperti bencana alam dan keamanan (Direktorat PSMP, 2007a).

Pada awal periode 2004-2009, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 persen dan proporsi penduduk usia di atas 10 tahun yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs/ sederajat baru mencapai sekitar 36,2 persen (Susenas 2003).

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7—12 tahun pada tahun 2004 sebesar 96,42 persen, usia 13—15 tahun sebesar 81,01 persen, dan 16—18 tahun sebesar 50,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 19,0 persen penduduk usia 13—15 tahun dan sekitar 49 persen penduduk usia 16—18 tahun yang belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka putus sekolah yang masih cukup signifikan ini lebih banyak diakibatkan oleh persoalan ekonomi terutama bagi anak-anak pada jenjang pendidikan dasar.

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APM SD/MI/ sederajat baru mencapai 94,12 persen. Sementara itu, APK SMP/MTs /sederajat adalah sebesar 81,22 persen .

Kesungguhan pembangunan pendidikan sampai dengan pertengahan tahun 2009 telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Perkembangan ini, antara lain, ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 7,47 persen pada tahun 2007, angka melek aksara penduduk usia

15 tahun ke atas sebesar 94,03 persen, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/ sederajat mencapai sebesar 95,14 persen dan APK SMP/MTs/ sederajat adalah sebesar 96,18 persen pada tahun 2008.

Peningkatan tersebut terjadi setelah pemerintah melaksanakan intensifikasi program pemberian subsidi untuk bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program peningkatan akses diantaranya program Block Grant (subsidi) Unit Sekolah Baru (USB) di kantong daerah yang tebal dan APK dibawah rata-rata nasional, Ruang kelas baru dan Ruang belajar lainnya di sekolah yang daya tampungnya melebihi batas, mengembangkan SD-SMP satu atap dikantong daerah yang tipis dan terpencar dengan memanfaatkan fasilitas SD yang sudah ada , layanan dan anak daerah khusus bagi anak daerah terpencil dan anak daerah konflik serta menyelenggarakan program SMP terbuka bagi anak yang mempunyai kendala biaya dan waktu belajar.

Hal lain yang dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparansi manajemen pendidikan melalui program block grant yang langsung diberikan ke sekolah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui kelembagaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, wilayah terpencil secara geografis sulit terjangkau sehingga belum semua penduduk usia sekolah mendapat akses dengan baik. Selain masalah geografis, kondisi ekonomi masyarakat dan sosial budaya juga merupakan faktor penentu terjadinya kesenjangan partisipasi penduduk di berbagai lapisan masyarakat.

Keluarga yang ekonominya rendah jarang sekali menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. Mereka beranggapan bahwa untuk menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SMP bukan hanya menambah beban mereka untuk pendidikan anak, tetapi juga mengurangi kesempatan anak mereka untuk mencari nafkah dan mereka juga beranggapan bahwa pendidikan pada

jenjang SMP belum merupakan kebutuhan dasar karena jenjang SD dinilai cukup untuk memadai untuk kehidupan sehari-hari. (Hidayati:1993).

Menurut data Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tahun 2009, APK Kota Tangerang Selatan yang dicapai adalah 77.13 persen sedangkan APM nya adalah 61,00 persen. Dilihat dari kondisi di atas, jelas terlihat bahwa APK dan APM kota Tangerang Selatan masih belum mencapai salah satu indikator ketuntasan wajib belajar yang dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- a. Tuntas pratama, bila APK mencapai $\geq 80\%$ s.d. $< 85\%$
- b. Tuntas madya, bila APK mencapai $\geq 85\%$ s.d. 90%
- c. Tuntas utama, bila APK mencapai $> 90\%$
- d. Tuntas paripurna, bila APK mencapai minimal 95%

Hasil pemahaman terhadap permasalahan di atas tentang partisipasi anak usia sekolah SMP dalam mendukung program wajar 9 tahun telah mewadahi penelitian partisipasi wajar 9 tahun ini yang penulis lakukan, di samping menjadi dasar pengembangan pemikiran dalam tesis ini.

Berdasarkan hal itulah maka dipandang perlu untuk melakukan kajian terhadap Faktor-Faktor yang menjadi penyebab anak usia sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama Tidak Berpartisipasi dalam mengikuti Wajib Belajar 9 Tahun Di Kota Tangerang Selatan. Hal ini mengingat bahwa ada beberapa permasalahan perlu untuk dikaji agar pelaksanaan program wajib belajar dapat terlaksana dengan baik

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul sebagai berikut : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SISWA LULUSAN SEKOLAH DASAR (SD) TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH KE JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA TANGERANG SELATAN

1.2. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah :
Faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat menemukan jawaban hal tersebut di atas adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di kota Tangerang Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk dapat menerapkan kebijakan yang tepat dalam menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Tangerang Selatan, peneliti melibatkan 5 (lima) orang tua yang anaknya tidak sekolah, 5 orang anak yang tidak sekolah untuk menggali informasi sebab-sebab mereka tidak bersekolah.

Penelitian ini juga melibatkan 2 (dua) orang Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan juga Kepala Sekolah SMP untuk mengetahui program-program yang dilakukan dan partisipasi siswa lulusan Sekolah Dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di kota Tangerang Selatan.

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari enam bab ditambah dengan kepustakaan yang menjelaskan apa yang tercantum dalam judul tesis ini, yaitu "Faktor-Faktor Penyebab Siswa Lulusan Sekolah Dasar Tidak Melanjutkan ke Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Tangerang Selatan".

Rincian sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- BAB 1 merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian.
- Bab 2 menjelaskan tentang tinjauan literatur yang berisi teori, pendapat ahli, dan hasil diskusi yang berkaitan dengan pendidikan.
- Bab 3 menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan penelitian, cara pengumpulan data, informan, analisis data.
- Bab 4 menjelaskan tentang gambaran umum Kota Tangerang Selatan
- Bab 5 menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian fakto-faktor penyebab siswa lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama. Selain itu dalam bab ini juga berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi riil pendidikan jenjang SMP berdasarkan data primer yang dikaitkan dengan data sekunder
- Bab 6 yang merupakan bab penutup membahas kesimpulan dan saran.. Kesimpulan diperoleh dari hasil pembahasan masalah pokok, sedangkan saran merupakan pemikiran bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terlaksana dengan baik.